

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi melekat hampir di semua negara di dunia. Kemajuan di bidang ekonomi diyakini mampu memajukan kesejahteraan masyarakat, termasuk Indonesia dengan salah satu tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum. Suatu keadaan disebut sejahtera ketika orang-orang dalam kondisi makmur, sehat dan damai. Taraf kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) dikaji dengan mencakup tujuh bidang yaitu kependudukan, kesehatan, pola konsumsi, pendidikan, kemiskinan, perumahan serta kondisi sosial ekonomi lainnya. Semakin terpenuhinya kebutuhan hidup maka tingkat kesejahteraan dapat dikatakan meningkat (Wahbi et al., 2020).

Kesejahteraan pada dasarnya adalah tujuan setiap keluarga. Keluarga adalah unit paling kecil masyarakat yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anggotanya, baik secara sosial, ekonomi, dan kelestarian hidupnya. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2011) kesejahteraan keluarga didefinisikan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan anggotanya dari sandang, pangan, perumahan, sosial dan agama, disamping terpenuhi kebutuhan pokok, terdapat pula keseimbangan penghasilan dengan keseluruhan anggota keluarga, mampu memenuhi kebutuhan kesehatan, hidup bermasyarakat dan beribadah yang khusuk. Menurut (Bakar et al., 2015)

kesejahteraan adalah keadaan fisik, sosial dan mental yang positif yang berasal dari sejumlah barang kolektif yang berhubungan dengan orang dan suatu tempat. Kesejahteraan ekonomi dalam suatu keluarga dapat dilihat dari terpenuhinya input keluarga yaitu dari aset, pendapatan, upah, dan pengeluaran (Puspitawati, Herien, 2013).

Umumnya kesejahteraan masyarakat dilihat dari besarnya pendapatan dalam hal pembiayaan kebutuhan dan perlu juga diketahui jumlah anggota keluarganya yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Menurut (Sukirno, 2006) terdapat faktor yang mempengaruhi kesejahteraan adalah komposisi umur penduduk, distribusi pendapatan, pola pengeluaran, komposisi pendapatan nasional, masa lapang dan keadaan pengangguran. Menurut (Qoyyimah & Wahini, 2017) faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga yakni jumlah atau besarnya keluarga, pendapatan yang diperoleh dan peran serta orang tua. Sedangkan dalam penelitian (Iskandar et al., 2010) pendapatan, pekerjaan, pendidikan dan jumlah anggota keluarga serta kepemilikan aset dan tabungan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi kesejahteraan.

Pendapatan menjadi suatu hal penting yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Pendapatan adalah nilai maksimum yang bisa dikonsumsi seseorang selama periode tertentu dan mengharapkan keadaan yang sama seperti semula di akhir periode (John, 2003). Jumlah pendapatan yang berbeda-beda dapat memberikan tingkat kesejahteraan yang berbeda pula. Umumnya pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan, karena masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam pemenuhan kebutuhannya. Didukung penelitian Iskandar (Iskandar et al., 2010) bahwa pendapatan keluarga yang tinggi

menimbulkan peluang yang lebih besar untuk lebih sejahtera dibandingkan dengan pendapatan keluarga yang lebih rendah. Menurut (Puspitawati, H. et al., 2019) masalah ekonomi yang sering terjadi dalam suatu keluarga yaitu belum mampunya keluarga dalam pemenuhan kebutuhan, yang pada dasarnya pemenuhan kebutuhan ini berasal dari pendapatan yang diterima.

Selain pendapatan, tingkat kesejahteraan keluarga juga dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga. Keluarga beranggota 6 orang dengan pendapatan Rp5.000.000,00 jika dibandingkan dengan keluarga beranggota 3 orang berpendapatan Rp2.500.000,00 belum tentu memiliki tingkat kesejahteraan yang sama. Ada potensi keluarga dengan jumlah anggotanya 6 orang memiliki taraf kesejahteraan lebih tinggi karena terdapat sejumlah pembiayaan yang digunakan secara bersama (Sukirno, 2006). Hal ini didukung penelitian (Syafitri, 2019) bahwa jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan keluarga.

Tujuan pembangunan ekonomi salah satunya adalah demi meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat. Upaya dalam pencapaian tujuan ini yaitu mengurangi penduduk yang termasuk kategori miskin (BPS, 2020). Dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan erat kaitannya dengan kemiskinan, karena dengan berkurangnya penduduk miskin dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Miskin artinya tidak berharta atau serba kekurangan sedangkan kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau anggota masyarakat tidak mampu memenuhi standar kebutuhan seperti makan, pakaian, tempat tinggal, edukasi, dan kesehatannya. Menurut (Hartomo & Aziz, 2004) kemiskinan bukan hal yang terbentuk dengan sendirinya, tidak melekat dari aspek yang lain,

kemiskinan merupakan hasil interaksi dalam kehidupan manusia yaitu dari beberapa aspek utamanya yang berkaitan dengan aspek sosial serta aspek ekonomi. Termasuk dalam aspek sosial yakni kesenjangan sosial antar masyarakat seperti adanya perbedaan suku, perbedaan ras, kelahiran, perbedaan usia yang sumbernya dari lapisan sosial masyarakat. Sedangkan yang termasuk aspek ekonomi yakni perbedaan antar masyarakat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam mengalokasikan banyaknya sumber daya ekonomi.

Center for International Forestry Research (CIFOR, 2007) menyatakan bahwa turunnya tingkat kemiskinan mencerminkan naiknya taraf kesejahteraan. Istilah kemiskinan dan kesejahteraan ini berkaitan dan memusatkan masalah yang sama dari dua cara pandang yang berbeda. Umumnya kemiskinan didefinisikan bahwa kurangnya kesejahteraan. Seseorang yang merasa sangat kurang kesejahteraannya maka ia pasti sedang dalam kemiskinan, sedangkan ketika ia merasa kondisinya sejahtera justru akan diliputi kebahagiaan, kemakmuran dan kepuasan. BPS mengukur jumlah penduduk miskin melalui pendekatan *basic needs approach*, yaitu pendekatan dengan konsep kemiskinan merupakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Jumlah dan persentasenya dihitung dari tingkat pengeluaran perkapitanya. Apabila pengeluaran per kapita lebih rendah dari garis kemiskinan maka masuk kategori miskin. Garis kemiskinan ini merupakan standar pengeluaran minimum dalam memenuhi kebutuhan dasar seseorang.

Berdasarkan data BPS sebagai dampak pandemi *Covid-19* kemiskinan di Provinsi Bali meningkat pada Maret 2020. Persentase kemiskinan Bali pada Maret 2020 mengalami kenaikan 0,17% dibandingkan dengan posisi September 2019,

sehingga tingkat kemiskinan menjadi 3,78%. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat Bali. Dikenal sebagai Pulau Dewata yang mengandalkan sektor pariwisata, akibat dampak pandemi justru mengalami penurunan sehingga berimbas pada pekerja di sektor informal. Banyaknya penduduk miskin di Bali pada September 2019 sekitar 156,91 ribu orang meningkat di bulan Maret 2020 sekitar 8,3 ribu orang, sehingga totalnya tercatat sekitar 165,19 ribu penduduk miskin.

Dari 9 Kabupaten atau Kota di Provinsi Bali, yang menduduki persentase penduduk termiskin adalah Kabupaten Karangasem. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Provinsi Bali tahun 2020 persentase penduduk miskin di Karangasem yaitu 5,91%. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2020 merupakan titik terburuk pada lima tahun terakhir, yakni 0,52 poin sementara indeks keparahan kemiskinan yaitu 0,06 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan serius yang merupakan tanggung jawab bersama utamanya pemerintah. Pemerintah sebagai penyangga kehidupan masyarakatnya diharapkan membuat jalan keluar yang bijak dalam usaha peningkatan kesejahteraan.

Letak Kabupaten Karangasem di bagian timur Bali terbagi menjadi 8 kecamatan dengan 78 desa/kelurahan. Setiap desa/kelurahan memiliki persebaran keluarga miskin yang berbeda-beda. (Jumlah keluarga miskin di masing-masing desa/kelurahan dapat dilihat pada lampiran 1).

Didasari data Dinas Sosial Kabupaten Karangasem per Januari 2020, jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin terbanyak di Kabupaten Karangasem terdapat di Kelurahan Karangasem yang terletak di pusat kota Karangasem yaitu

sebanyak 2.165 KK. Berkaitan dengan data BPS pada September 2019 hingga Maret 2020 ditunjukkan persentase kemiskinan didominasi wilayah perkotaan yakni meningkat dari 3,04% menjadi 3,33% sebaliknya, persentase kemiskinan wilayah perdesaan yakni menurun dari 4,86% menjadi 4,78%. Hal ini menjadi persoalan yang menarik karena umumnya daerah perkotaan memiliki aktivitas yang lebih padat sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan juga lebih banyak semestinya mampu menyokong masyarakatnya memiliki pendapatan yang memadai. Banyaknya KK miskin di Kelurahan Karangasem ini mengindikasikan pendapatan yang diperoleh masyarakat belum mampu memenuhi semua kebutuhan pokok anggota keluarganya.

Jumlah penduduk di Kelurahan Karangasem berdasarkan data per November 2020 adalah 19.059 orang dengan jumlah KK 5.724. jika dirata-ratakan maka jumlah anggota keluarga per KK adalah 3 sampai 4 orang sehingga termasuk golongan keluarga kecil. Keluarga yang kecil tentunya menggambarkan pengeluaran yang lebih sedikit terutama untuk konsumsi dan beberapa kebutuhan lainnya, namun ini belum menggambarkan penurunan jumlah KK miskin di Kelurahan Karangasem. Hal ini menjadi persoalan yang perlu diteliti lebih lanjut terkait banyaknya KK miskin di Kelurahan Karangasem.

Berdasarkan uraian diatas begitu pentingnya dilakukan penelitian mengenai kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karangasem, dengan ini penulis tertarik meneliti dengan judul **“Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Anggota Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karangasem”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, teridentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

1. Kabupaten Karangasem menduduki persentase kemiskinan paling tinggi di Provinsi Bali.
2. Rendahnya tingkat kesejahteraan di Kelurahan Karangasem dilihat dari jumlah keluarga miskin, padahal Kelurahan Karangasem terletak di daerah perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan kabupaten.
3. Pendapatan yang diperoleh belum menunjukkan kesejahteraan bagi setiap anggota keluarga.
4. Rata-rata keluarga di Kelurahan Karangasem tergolong keluarga kecil belum menjamin tingkat kesejahtraannya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, serta dengan mempertimbangkan segala keterbatasan, penulis hanya membatasi masalah penelitian pada pengaruh pendapatan dan jumlah anggota keluarga terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karangasem.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karangasem?

2. Apakah jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karangasem?
3. Apakah pendapatan dan jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karangasem?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui.

1. Pengaruh pendapatan terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karangasem.
2. Pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karangasem.
3. Pengaruh pendapatan dan jumlah anggota keluarga terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karangasem.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta tujuan penelitian diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat yaitu memberi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan referensi dan berkontribusi sebagai bentuk sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis terutama di lingkungan Undiksha.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran permasalahan kemiskinan begitu penting dan mendesak untuk diatasi, karena keberhasilan pembangunan ekonomi terlihat dari pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Undiksha

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran untuk almamater, juga menambah wawasan terkait kesejahteraan keluarga.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan membuat kebijakan guna pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Kelurahan Karangasem.

